EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.3, No.4, Mei 2024

Strategi Pemerintah Desa Dalam Mencapai Predikat Desa Mandiri Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso

Fridly Devid Gunawan Tasiabe[1], Failur Rahman[2], Haerul Anam[3], Nuryana Haprin[4], Rita Yunus[5]
Universitas Tadulako
E-mail: devid23tasiabe@gmail.com[1], Failur.Rahman@untad.ac.id[2], chaerul.anam30@gmail.com[3], nuryana_haprin@yahoo.com[4], rythayunus76@gmail.com[5]

Article History:
Received: 01 Mei 2024
Revised: 21 Mei 2024
Accepted: 23 Mei 2024

Keywords: *Desa, Strategi, Indeks Desa Membangun*

Abstract: *Penelitian ini betujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah Desa Wuasa dalam meningkatkan status desa menjadi desa mandiri. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakuakan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah Desa Wuasa menggunakan 1). melakukan pemetaan potensi desa serta jaringan pasar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi bagi desa dan masyarakat, 2) menerapkan metode pembinaan, pembimbingan, atau pendampingan langsung diharapkan dapat mempercepat pembangunan dalam aspek sosial-budaya, memperkuat kapasitas pemerintah desa, serta menyusun ulang administrasi pemerintah desa, 3) menggalang sinergi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah dan nasional, 4) mengembangkan sistem tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berakar pada budaya lokal desa. Strategi-strategi yang diterapkan tersebut bertujuan untuk meningkatkan indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam Indeks Desa Membangun.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berupaya meningkatkan pembangunan nasional. Tujuan utama dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong inovasi di dalam masyarakat tersebut (Bahasoan et al., 2024).

Salah satu aspek yang sangat penting dalam diskusi tentang Peraturan Menteri Desa No. 2 Tahun 2016 adalah terkait dengan indeks desa membangun. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh desa dalam upaya mencapai status desa mandiri, seperti keterbatasan sumber daya alam, posisi geografis, dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, tingkat kesiapan dalam tata kelola yang masih rendah serta kekurangan sumber daya manusia (SDM) di desa juga dapat menjadi penghalang dalam mencapai tujuan menjadi desa mandiri (Nnik Mandasari, 2021).

Indeks Desa Membangun mengelompokkan desa ke dalam lima status, yaitu :

1) Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2) Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3) Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4) Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5) Desa Mandiri : > 0,815

Pengelompokan ini bertujuan untuk mencerminkan variasi karakteristik setiap desa dalam rentang skor 0,27 hingga 0,92 pada Indeks Desa Membangun. Melalui klasifikasi ini, penetapan status perkembangan desa dapat lebih akurat, dan rekomendasi kebijakan yang tepat dapat disusun. Klasifikasi berdasarkan Indeks Desa Membangun juga bertujuan untuk memperkuat upaya dalam mendukung kemajuan desa dalam mengelola aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan, sehingga dapat mencapai status desa mandiri.

Sebagai upaya dalam meningkatkan status desa, Kementerian Desa menjalin berbagai kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan lembaga pendidikan. Ini bertujuan memfasilitasi desa dalam menyelesaikan masalah lokal dan mempercepat pembangunan. Melalui Indeks Desa Membangun, diharapkan memudahkan pemahaman tentang tantangan desa dengan menggunakan 52 indikator yang kemudian dapat dijabarkan menjadi program unggulan yang sesuai sasaran.

Sehubungan dalam konteks tersebut, persiapan menjadi hal krusial yang harus dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk menerapkan perubahan. Persiapan di sini juga diartikan sebagai alat pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi. Persiapan yang dimaksud dalam konteks ini adalah strategi yang diadopsi oleh pemerintah desa dalam mengelola desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Tanpa persiapan yang memadai dari pemerintah desa, maka pencapaian target yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tidak akan tercapai. Dalam konteks penelitian ini, persiapan merujuk pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, perencanaan, penyediaan infrastruktur desa, serta manajemen kelembagaan desa sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan strategi-strategi dari pemerintah desa untuk mencapai kemandirian desa yang diinginkan.

Desa Wuasa terletak di Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia, dengan luas wilayah mencapai 113,11 km2. Pada tahun 2024 Desa Wuasa memiliki populasi sebanyak 3.470 penduduk. Terletak di Lembah Napu, kira-kira 105 kilometer ke arah selatan dari Palu, desa ini terhubung dengan ibu kota provinsi melalui Jalan Nasional Trans Sulawesi. Sebagai ibu kota kecamatan dan titik penghubung antara Poso dan Palu, Wuasa menunjukkan aktivitas ekonomi, sosial, dan administratif yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa sekitarnya. Meskipun memiliki status administratif dan kesejahteraan ekonomi yang relatif, Wuasa memiliki semua ciri khas yang ditemukan dalam desa-desa yang didirikan oleh pemerintah, seperti desa transmigran dan pemukiman kembali di seluruh Indonesia. Sebuah survei cepat terhadap fasilitas umum yang ada di desa ini memberikan kesan yang positif.

Pada tahun 2023 Desa Wuasa mendapat penghargaan dari kementrian yaitu sebagai desa berprestasi dan juga sebagai desa mandiri dalam kegiatan Citra Desa Award 2023 yang di gelar di kabupaten Poso. Desa Wuasa juga merupakan satu-satunya desa yang menyandang status desa mandiri yang ada di dataran tinggi napu. Berdasarkan Indeks Desa Membangun 2023, Desa Wuasa saat ini telah menyandang status sebagai desa mandiri dengan nilai yang di peroleh mencapai 0,8414. Hal ini tidak lepas dari upaya dan strategi pemerintah desa dalam mencapai kemandirian desa. Oleh sebab itu untuk meningkatkan status desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, diperlukan langkah-

langkah atau strategi yang bertujuan mencapai kemandirian desa, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul "Strategi Pemerintah Desa Dalam Mencapai Predikat Desa Mandiri Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang di lakukan pemerintah Desa Wuasa dalam mencapai predikat desa mandiri.

LANDASAN TEORI

Desa

Menurut Widjaja (Abdurokhman, 2014) desa merupakan sebuah entitas sosial hukum yang memiliki struktur asli yang didasarkan pada hak asal-usul yang memiliki karakteristik yang istimewa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan area geografis yang ditinggali oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan internal (yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa), atau desa adalah sekumpulan rumah di luar kota yang membentuk sebuah kesatuan.

Kemudian menurut Pasal 1 Bab I UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatakan bahwa: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Menurut Soemantri (Ramdana et al., 2021), pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa yang didukung oleh staf administratif Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Staf administratif Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan personel lainnya, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas teknis lapangan dan pengaturan wilayah, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta kondisi sosial dan budaya lokal.

Strategi

Menurut David (Gustiman et al., 2021) strategi adalah metode yang digunakan dalam mengelola sebuah organisasi sehingga tujuan dan misi organisasi tersebut dapat tercapai. Dengan kata lain, strategi merupakan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Menurut pendapat Rangkuti dalam Purnawati & Putri (2021) , strategi merupakan perencanaan induk yang komprehensif yang menguraikan cara perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sedarmayanti (Ramdana et al., 2021) manajemen strategis merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara berkelanjutan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja, dan dilaksanakan sesuai dengan rencana serta harapan konsumen di masa mendatang. Setiap strategi memerlukan evaluasi terhadap rencana yang telah dibuat karena kemungkinan adanya perubahan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan yang tidak terduga sebelumnya.

Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun mengelompokkan desa ke dalam lima status, yaitu: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa

Mandiri. Pengelompokan ini bertujuan untuk mencerminkan variasi karakteristik setiap desa dalam rentang skor 0,27 hingga 0,92 pada Indeks Desa Membangun. Melalui klasifikasi ini, penetapan status perkembangan desa dapat lebih akurat, dan rekomendasi kebijakan yang tepat dapat disusun. Pengklasifikasian dalam lima status desa tersebut juga bertujuan untuk memperjelas penentuan status perkembangan desa serta memberikan rekomendasi intervensi kebijakan yang dibutuhkan. Klasifikasi status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun juga dimaksudkan untuk mendukung upaya memfasilitasi pembangunan Desa menuju keberlanjutan dan kemandirian. Desa yang berkembang, terutama yang telah maju, memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, yang pada akhirnya akan membawanya menuju status desa mandiri (Kementerian Desa, 2015).

Dengan nilai rata-rata Indeks Desa Membangun secara nasional sebesar 0,566, klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut :

1) Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2) Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3) Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4) Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5) Desa Mandiri : > 0,815

Penelitian terdahulu

Risdian Sujani (2019) Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan telah berjalan dengan baik. Salah satu upaya untuk mengatasi hambatan adalah dengan mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan mengenai potensi yang dimiliki oleh mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan langsung dalam pertemuan tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pembinaan sehingga masyarakat secara sukarela dapat menyumbangkan tenaga, alat, atau dana untuk pembangunan desa.

Arifah & Kusumastuti (2019) Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang di lakukan pemerintah desa yaitu pemetaan potensi, pembinaan, dan pendampingan serta membangun sinergi dan menerapkan tata kelola desa menjadi organisasi modern. Sebagai hasil transformasi pembangunan, terjadi peningkatan dalam pelayanan kesehatan, sarana, dan prasarana. Selain itu, diversifikasi produksi masyarakat dan program mitigasi bencana juga mengalami peningkatan.

Nuraini Syafitri & Sadad, (2022) Hasil penelitian menyatakan bahwa peran pemerintah desa dalam mendorong kemajuan dan kemandirian desa di Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar masih belum optimal. Pemerintah desa belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, terkendala oleh keterbatasan dana, dan masih menghadapi tingkat partisipasi masyarakat yang rendah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu untuk memperoleh deskripsi mengenai strategi pemerintah Desa Wuasa dalam mencapai status desa

mandiri. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan yang telah dipilih peneliti dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu Kepala Desa Wuasa, Ketua BPD dan Kepala Dusun. Data yang di peroleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis yang di lakukan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Wuasa menerapkan empat strategi untuk memajukan desa menuju kemandirian, yaitu :

Pertama, dilakukan pemetaan potensi desa serta jaringan pasar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi bagi desa dan masyarakat. Dari hasil wawancara Bersama Kepala Desa Wuasa, Desa Wuasa memiliki beragam potensi wisata, termasuk objek wisata air terjun, air panas, padang peternakan Wuasa, danau, serta berbagai potensi lainnya. Karena terletak di daerah pegunungan, tidak mengherankan bahwa desa ini kaya akan sumber daya alam, termasuk wisata alam. Pemerintah memanfaatkan potensi ini sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakatnya. Cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini membantu meningkatkan kemandirian dan perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi Desa Wuasa untuk mencapai kemandirian desa adalah dengan mengevaluasi sejauh mana potensi yang dimiliki. Kemudian, berdasarkan potensi tersebut, program-program dirancang atau dibentuk agar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi desa dan masyarakat sekitarnya. Dengan adanya program yang sesuai dengan potensi yang ada, diharapkan pendapatan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat dapat meningkat.

kedua, penerapan metode pembinaan, pembimbingan, atau pendampingan langsung diharapkan dapat mempercepat pembangunan dalam aspek sosial-budaya, memperkuat kapasitas pemerintah desa, serta menyusun ulang administrasi pemerintah desa. Dalam menjalankan pemerintahan, Desa Wuasa telah melaksanakan administrasi dengan tertib, didukung oleh sistem Teknologi Informasi (IT) yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Debitur (SID). Profil desa tersebut mencakup administrasi umum, kependudukan, keuangan, pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta administrasi lainnya. Selain itu, dalam pelaksanaan tanggung jawabnya di sektor pemerintahan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan, dan pembangunan, Pemerintah Desa Wuasa berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat ini diatur dalam penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, di mana perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif. Perencanaan partisipatif di Desa Wuasa dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari pemerintah desa, lembaga desa, kelompok-kelompok masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lain sebagainya.

Dalam upaya menggalakkan inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintah Desa Wuasa menyelenggarakan pelatihan pendampingan dan pembinaan bagi lembaga desa, kelompok masyarakat, serta mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Program yang dilaksanakan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) ini mencakup pelaksanaan pelatihan dan pembinaan bagi lembaga desa dan perangkat desa. Diharapkan dengan adanya pelatihan dan pendampingan ini, kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) di Desa Wuasa akan semakin meningkat. Dengan demikian, akan timbul semangat kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Langkah tambahan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan meningkatkan kapasitas masyarakat.

Dalam strategi kedua ini, fokus Desa Wuasa lebih ditujukan pada peningkatan kapasitas, penataan administrasi desa, dan pembangunan desa dalam aspek sosial budaya. Pembuktian atas hal ini terwujud melalui keteraturan administrasi, penyelenggaraan pelatihan untuk kelompok guna meningkatkan keterampilan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Ketiga, menggalang sinergi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah dan nasional. Untuk menciptakan desa yang mandiri, diperlukan perencanaan yang teliti agar pembangunan dapat berlangsung dengan lancar dan hambatan yang muncul dapat diatasi dengan efektif. Upaya pencapaian Desa Wuasa sebagai desa mandiri tidak hanya tergantung pada Pemerintah Desa Wuasa semata, melainkan juga melibatkan kontribusi dari Pemerintah Kecamatan Lore Utara dan Kabupaten Poso. Kemajuan pembangunan di Desa Wuasa dicapai melalui kerjasama antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah nasional yang sinergis. Manifestasi dari sinergi ini adalah pelaksanaan bersama program-program yang telah direncanakan, baik oleh pemerintah daerah maupun nasional. Program yang dimiliki oleh pemerintah daerah kemudian dijalankan oleh pemerintah desa. Demikianlah yang terjadi di Desa Wuasa.

Walaupun kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah nasional sudah berjalan baik, sinergi ini tidak akan memadai tanpa dukungan dari masyarakat. Kemajuan pembangunan akan tercapai secara optimal dan berhasil bila pemerintah mampu bekerja sama dengan masyarakat, yang menjadi fokus utama pembangunan. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Wuasa telah berhasil menerapkan konsep tersebut. Apabila masyarakat enggan berpartisipasi dalam pembangunan, maka Desa Wuasa tidak akan memiliki status mandiri seperti saat ini. Ini terlihat dari implementasi program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, di mana masyarakat mau menerima dan turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaannya. Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat akan mempermudah kelancaran pembangunan di Desa Wuasa. Dengan demikian, tujuan yang telah dirancang sejak awal dapat tercapai. Masyarakat akan meraih kesejahteraan, perekonomian meningkat, dan kemandirian desa dapat terwujud.

Dengan demikian, sebuah pembangunan akan mencapai keberhasilan dan kemajuan yang lebih baik jika dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Keberhasilan pembangunan Desa Wuasa pada saat ini tak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan nasional. Pembangunan wilayah tidak akan berhasil secara optimal tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Selain pemerintah daerah dan nasional, pemerintah Desa Wuasa juga terus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat untuk mencapai pembangunan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Keempat, Mengembangkan sistem tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berakar pada budaya lokal desa. Pemerintah Desa Wuasa telah menerapkan sistem teknologi informasi berbasis internet dalam menjalankan pemerintahannya. Semua administrasi desa, termasuk kependudukan, keuangan, dan pelayanan masyarakat, dijalankan melalui sistem komputerisasi. Pemerintah Desa Wuasa juga telah menyediakan akses internet gratis di kantor Desa Wuasa untuk kepentingan masyarakatnya.

Meskipun Desa Wuasa telah maju dalam pembangunan dan memiliki pemahaman teknologi yang baik, namun tidak pernah mengabaikan budaya asli yang ada di desa tersebut.

Pemerintah serta Masyarakat Desa Wuasa masih sangat memegang erat adat istiadat yang berlaku. Pemerintah Desa Wuasa berupaya mempertahankan adat, tradisi, dan budaya dengan menjalankan program-program yang berkaitan dengan kebudayaan. Program tersebut mencakup pelestarian upacara adat, pesta rakyat, dan kegiatan lainnya. Dalam strategi yang terahir ini yaitu mengembangkan sistem tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berakar pada budaya lokal desa. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Wuasa terus berusaha untuk meningkatkan penataannya menjadi lebih baik. Walaupun teknologi telah maju, pemerintah dan masyarakat Desa Wuasa tetap menjaga kelestarian budaya dan tradisi mereka.

Setelah dianggap berhasil menerapkan strategi untuk mengubah pembangunan menuju desa mandiri, langkah berikutnya adalah melihat wujud pembangunan Desa Wuasa setelah mencapai status desa mandiri. Pada tahun 2023, Desa Wuasa telah mencapai status sebagai desa mandiri. Berikut adalah pencapaian Desa Wuasa dalam meraih status sebagai desa mandiri yang tercatat dalam Indeks Desa Membangun (IDM).

Tabel 1. Indeks Desa Membangun 2023

Indeks Komposit	Dimensi	Perangkat Indikator	Indikator Peritem
Sosial (IKS)	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Jarak ke sarana kesehatan terdekat
			Ketersediaan tenaga Kesehatan (bidan, dokter dan nakes lain)
		Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan	Akses ke poskesdes, polindes atau posyandu
			Tingkat aktivitas posyandu
		Jaminan Kesehatan	Tingkat kepesertaan BPJS
	Pendidikan	Akses Pendidikan Dasar-Menengah	Akses Pendidikan dasar SD/MI < 3 KM
			Akses pendidikan SMP/MTs < 6 KM
			Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM
		Akses Pendidikan Non Formal	Kegiatan PAUD
			Kegiatan PKMB/Paket A-B-C
	Modal Sosial	Solidaritas Sosial	Kebiasaan gotong royong
			Keterbukaan ruang publik
			Terdapat kelompok olahraga
		Toleransi	Keragaman suku/Etnis di Desa
			Bahasa sehari-hari warga Desa
			Agama mayoritas warga Desa

		Rasa Aman Warga Desa	Tersedianya sarana Pos Kamling di Desa
			Partisipasi warga sis Samling
			Kejadian perkelahian masal di Desa
		Kesejahteraan Sosial	Terdapat akses ke sekolah luar biasa
			Terdapat penyandang Kesejahteraan sosial (Anjal dan pengemis)
	Pemukiman	Akses Air Bersih Dan Layak Minum	Mayoritas warga memiliki sumber air layak minum
			Akses warga memiliki air mandi dan mencuci
		Akses Ke Fasilitas Sanitasi	Mayoritas warga memiliki jamban
			Terdapat tempat pembuangan sampah
		Akses Ke Fasilitas Listrik	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik
		Akses Fasilitas Informasi Dan Komunikasi	Warga memiliki telepon seluler dan sinyal kuat
			Akses internet di kantor Desa
			Terdapat akses internet untuk warga
Ekonomi (IKE)	Keragaman Produksi	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk
	Perdagangan	Tersedianya Pusat Perdagangan	Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen)
			Terdapat pasar Desa
			Terdapat sektor perdagangan (warung, minimarket)
	Akses Distribusi	Akses Distribusi Logistik	Terdapat kantor pos dan jasa logistik
	Akses Kredit	Akses Terhadap Lembaga Keuangan Dan Perkreditan	Tersedianya Lembaga perbankan umum dan BPR
			Akses penduduk ke kredit
	Lembaga Ekonomi	Lembaga Ekonomi	Tersedianya Lembaga ekonomi rakyat (koperasi)/Bumdes
			Terdapat usaha kedai makan, restoran, hotel dan penginapan

	Keterbukaan Wilayah	Keterbukaan Wilayah	Terdapat Moda (angkutan umum, trayek regular dan jam operasi)
			Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih
			Kualitas jalan Desa
Lingkungan (IKL)	Kualitas Lingkungan	Kualitas Lingkungan	Pencemaran air, tanah dan udara
	Potensi dan Tanggap Bencama	Potensi Rawan Bencana	Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)
		Tanggap Bencana	Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam

Sumber : Indeks Desa Membangun

Dimensi Ketahanan Sosial

Indeks ini mencakup empat dimensi, yakni kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman. Namun, saya tidak merincikan keempat dimensi tersebut, tetapi hanya memusatkan perhatian pada dimensi kesehatan. Dimensi ini dianggap istimewa, dengan beberapa fasilitas yang tersedia di Desa Wuasa yang mungkin tidak dimiliki oleh desa-desa lainnya, itu menjadi alasan mengapa saya memilih untuk lebih memusatkan perhatian pada dimensi ini.

Dalam dimensi Kesehatan Desa Wuasa terdapat puskesmas dengan dengan beberapa tenaga Kesehatan yaitu :

Tabel 2. kader atau tenaga kesehatan

No	Fasilitas Kesehatan	jumlah
1	Dokter	1
2	Perawat	19
3	Bidan	24
4	Farmasi	1
5	Analis	2
6	Gizi	1
7	Epidemiologi	3
8	Promkes	1
9	Kesling	2

Meskipun hanya tersedia puskesmas dan belum memiliki rumah sakit, fasilitas fisik untuk kesehatan di Desa Wuasa telah cukup lengkap. Sebelum menjadi desa mandiri, penduduk Desa Wuasa mengalami kesulitan untuk mengakses puskesmas karena kurangnya transportasi yang memadai. Namun, kini Desa Wuasa telah dilengkapi dengan ambulans desa yang siap melayani, mengantarkan, dan menjemput masyarakat yang sakit tanpa biaya. Selain terdapat ambulans gratis, Desa Wuasa juga dilengkapi dengan posyandu dan beragam fasilitas kesehatan lainnya. Dengan tersedianya beragam fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Wuasa, diharapkan masyarakat menjadi lebih peduli dan rajin memeriksa kesehatannya. Kehadiran ambulans desa juga mempermudah akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Dimensi Ketahanan Ekonomi

Sebelum memperoleh status sebagai desa mandiri, mata pencaharian utama penduduk Desa Wuasa adalah bertani, tetapi saat ini mereka memiliki beragam mata pencaharian.

diantaranya adalah, perdagangan, pelayanan jasa dan lain sebagainya. Pada dimensi ekonomi ini, wujud tranformasi yang dapat dilihat adalah mata pencaharian di Desa Wuasa semakin beragam. Mayoritas masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai petani, kini mulai mengeksplorasi peluang sebagai pelaku usaha tambahan. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah desa dalam mengembangkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan serta memberikan bantuan berupa alat atau modal usaha. Diharapkan dengan bantuan dari pemerintah, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Wuasa meningkat, memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan diversifikasi lebih lanjut dalam mata pencaharian mereka.

Dimensi Ketahanan Ekologi

Sebelum mencapai status desa mandiri, Desa Wuasa belum memiliki program khusus dalam hal penanggulangan bencana. Setelah mencapai status desa mandiri, program-program yang berkaitan dengan ketahanan ekologi mulai diterapkan secara luas. Sebagai respons terhadap hal tersebut, dibentuklah desa tanggap dan siaga bencana. Upaya ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana di masa mendatang sehingga masyarakat dapat merasa lebih terlindungi dengan adanya kelompok-kelompok tanggap bencana. Ini dapat dilihat dari perubahan pembangunan Desa Wuasa menuju status desa mandiri dalam aspek ketahanan ekologi.

Berkat tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap di Desa Wuasa maka berkurang pula masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, ekonomi di Desa Wuasa juga mengalami peningkatan yang signifikan dan pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan. Hal ini sebagaimana yang di kemukakan oleh Bapak Budi Utomo selaku kepala Desa Wuasa sebagai berikut :

“Salah satu syarat untuk mencapai status desa mandiri adalah pendapatan masyarakat desa sudah harus di atas rata-rata, dalam artian masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi lebih sedikit”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa strategi yang di jalankan oleh pemerintah Desa Wuasa dalam mencapai status desa mandiri adalah melakukan pemetaan potensi desa serta jaringan pasar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi bagi desa dan masyarakat; menerapkan metode pembinaan, pembimbingan, atau pendampingan langsung diharapkan dapat mempercepat pembangunan dalam aspek sosial-budaya, memperkuat kapasitas pemerintah desa, serta menyusun ulang administrasi pemerintah desa; menggalang sinergi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah dan nasional; dan mengembangkan sistem tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berakar pada budaya lokal desa.

Dampak yang dirasakan dari berubahnya status desa maju menjadi desa mandiri adalah kesejateraan masyarakat yang ditandai dengan ekonomi di desa wuasa mengalami peningkatan dan pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan.

DAFTAR REFERENSI

Abdurokhman. (2014). *Pengembangan Potensi Desa*.

Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *8*(1), 43. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119

Gustiman, Y., Kuantan Singingi, I., Gatot Subroto, J., Nenas, K., Kuantan, T., Kuantan Singigi, K., & Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, D. (2021). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, *2*.

Kementerian Desa, P. D. T. dan T. (2015). *Indeks Desa Membangun*.

Laily Purnawati, & Ovilia Inda Putri. (2021). Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Desa Waung (Studi Pada Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, *12*(1), 70–92. https://doi.org/10.36563/publiciana.v12i1.197

Nnik Mandasari. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Pembangunan Desa dan Strategi Meniju Desa Mandiri (Studi Kasus di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci)* (Vol. 4, Issue 1).

Nur Arifah, M., & Kusumastuti, N. (2019). Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri : Studi di Desa Kemadang Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, *2*(1), 169–188. https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-09

Nuraini Syafitri, N. S., & Sadad, A. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *8*(1), 81–91. https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9301

Ramdana, F., Usman, J., & Mone, A. (2021). *Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Kampung Sabbeta Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng*. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index

Risdian Sujani, M. (2019). Strategi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Dewasari Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis. In *Jurnal MODERAT* (Vol. 5).

Rizki Yunan Muharam, & Haviz, M. (2022). Strategi Peningkatan Status Desa dari Tertinggal menjadi Desa Berkembang. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 125–132. https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.1238